PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT DALAM PRAKTIK HUKUM DI INDONESIA; IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

Achmad Sujoko¹, Ali Hadi²

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Kamal (STAIKA) Sarang Rembang
Email: ¹sujokoachmad186@gmail.com, ²lawyeralihadi@gmail.com

ABSTRACT

An advocate is a person whose profession is to provide legal services, both inside and outside the court, who meet the requirements based on the provisions of the law. In providing legal services, he can do it for free or get an honorarium/fee from the client. Advocates' code of ethics are some of the factors that trigger these violations. Advocate Personality is Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2003 concerning Advocates and the code of ethics for advocates which is regulated in legal practice in Indonesia. And how to handle violations of the code of ethics in the context of law and professional ethics. Code of Ethics for Advocates in Indonesia to ensure conformity between the ideals of the Law and daily practice. Regulatory machines such as the Advocates' Organization and the Honorary Council need to be evaluated periodically for consistency and fairness. Serious sanctions reflect a commitment to high standards, but a balance between fairness and proportionality must be struck. By increasing enforcement, monitoring and evaluation, the ethical foundations of advocates can be strengthened, maintain public trust and advance the development of the legal profession.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam memberikan jasa hukum, ia dapat melakukan secara prodeo atau mendapatkan honorarium/fee dari klien. kode etik advokat adalah beberapa faktor yang memicu pelanggaran tersebut. Pribadi Advokat adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan kode etik advokat yang diatur dalam dalam praktik hukum di Indonesia . Dan bagaimana penanganan pelanggaran kode etik tersebut dalam konteks hukum dan etika profesi. Kode Etik Advokat di Indonesia untuk memastikan kesesuaian antara idealisme Undang-Undang dan praktik sehari-hari. Mesin regulasi seperti Organisasi Advokat dan Dewan Kehormatan perlu dievaluasi secara berkala demi konsistensi dan keadilan. Sanksi yang serius mencerminkan komitmen terhadap standar tinggi, namun perlu diperhatikan keseimbangan antara keadilan dan proporsionalitas. Dengan peningkatan penegakan, pengawasan, dan evaluasi, fondasi etika advokat dapat diperkuat, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memajukan perkembangan profesi hukum.

Keywords: *Violation, Advocate Code of Ethics, Legal Practice, Law No. 18*

PENDAHULUAN

Etika memiliki akar etimologi dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu: Ethos dan Ethikos. Ethos adalah sifat, watak, kebiasaan atau tempat yang biasa sedangkan Ethikos adalah Susila, keadaban, kelakuan dan suatu perbuatan yang baik.¹ Etika dalam bahasa Arab dikenal sebagai akhlaq yang artinya budi pekerti dan dalam Bahasa Indonesia etika disebut sebagai tata susila. Lahirnya organisasi advokat dari tahun ke tahun yaitu sebagai berikut : pada tanggal 14 Maret 1963, Persatuan Advokat Indonesia (PAI), tahun 1964 di deklarasikan Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), tahun 1979 PERADIN membentuk Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum (LPPH), tanggal 10 November tahun 1985 berdirilah Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), tahun 1987 pemerintah memberikan izin pendirian Ikatan Penasehat Hukum (IPHI), tahun 1988 beberapa konsultan mendirikan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan tanggal 4 April 1989 lahirlah Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).

Pada tanggal 8 April 1996 IKADIN, AAI, dan IPHI membentuk wadah kerjasama bernama Forum Komunikasi Advokat Indonesia (FKAI), tidak lama kemudian Forum Komunikasi Advokat Indonesia (FKAI) berubah nama menjadi Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang dibentuk oleh IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHAI, dan HKHPM.

Hal yang menarik adalah adanya suatu fakta bahwa sebelum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) terbentuk, 7 (tujuh) organisasi advokat yang tergabung dalam Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang terdiri dari : Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKPM), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI). Pada tanggal 23 Mei 2002 sepakat menetapkan satu kode etik yaitu Kode Etik Advokat Indonesia, yang berlaku bagi semua advokat Indonesia tidak terkecuali penasehat hukum berkebangsaan asing yang berpraktek di Indonesia.

Advokat merupakan salah satu unsur dari sistem peradilan dalam penegakan supremasi hukum. Advokat dalam menjalankan tugasnya adalah membela kepentingan hukum klien baik diluar maupun di dalam lingkungan pengadilan. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, dimana saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya.²

Pribadi Advokat dalam menjalankan profesinya adalah memakai payung hukum pada Undang Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, selain itu harus menjalankan profesi yang diberikan batasan-batasan etik sebagaimana kode etik sebagai jiwa atau roh dari profesi advokat. Namun demikian masih ada banyak yang menjalankan profesi iadvokat itu terjadi pelanggaran etika profesi advokat dalam praktik hukum yang disebabkan oleh sejumlah faktor kompleks. Tekanan dari praktik yang kompetitif, konflik kepentingan, dan kurangnya pemahaman terhadap kode etik advokat adalah beberapa

¹ Lorens, Bagus. 2000. *Kamus Filsafa*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka) h. 217

² Sumaryono E, 1995. *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius) h. 33

faktor yang memicu pelanggaran tersebut. Faktor-faktor pribadi, lingkungan kerja, dan budaya organisasi juga dapat berperan terjadinya pelanggaran kode etik. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan mendalam terhadap pelanggaran-pelanggaran kode etik advokat dalam praktik hukum di Indonesia.

Maka dalam penelitian ini dilakukan secara normatif dengan judul “Tinjauan Pelanggaran Kode Etik Advokat dalam Praktik Hukum di Indonesia (Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat).”

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan dengan bantuan pendekatan bersifat empiris yaitu membahas pelaksanaan kode etik advokat sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003. Selanjutnya, akan dianalisis bagaimana pelanggaran terhadap kode etik tersebut ditangani dalam ranah hukum dan etika profesi advokat. Langkah pertama adalah mengidentifikasi literatur terkait dan peraturan yang mendukung analisis ini. Menurut Sunaryati Hartono, dengan melakukan perbandingan hukum akan ditarik kesimpulan bahwa kebutuhan-kebutuhan universal (sama) akan menimbulkan cara-cara pengaturan yang sama pula dan kebutuhan-kebutuhan yang khusus dan pendekatan kasus (*case approach*), dalam penelitian normatif tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum.³ Namun ada satu hal yang pasti dalam suatu penelitian hukum normatif adalah penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁴

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif, penggunaan temuan-temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain sangat bermanfaat dalam rangka analisis dan eksplanasi hukum. Sebagai ilmu bantu (*hulp-wetenschap*) terdapat ilmu hukum normatif, ilmuwan hukum dapat dan bahkan harus memanfaatkannya adalah dengan menegaskan pendekatan (*approach*) apa yang dilakukan dan mengapa memilih pendekatan tersebut, sebagai pertanggung jawaban ilmiah dalam memanfaatkan temuan disiplin ilmu-ilmu lainnya tersebut.⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan metode normatif karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga data yang diperoleh dari kepustakaan (data sekunder) baik bahan hukum primer.

Pelaksanaan Kode Etik Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam memberikan jasa hukum, ia dapat melakukan secara *prodeo* atau mendapatkan *honorarium/fee* dari klien.⁶ Peran advokat dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 26 tentang Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat yang berbunyi:

³ Efendi, Ibrahim, 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana) h. 132-146

⁴ Efendi, Ibrahim, 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana) h. 131

⁵ Efendi, Ibrahim, 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana) h. 146

⁶ Rahmat Rosyadi, 2003. *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia), h. 17

1. Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.
2. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
3. Kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
5. Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
6. Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.
7. Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya Pasal 26 menetapkan landasan penting untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat. Kode etik yang disusun oleh Organisasi Advokat berfungsi sebagai pedoman bagi Advokat untuk mematuhi norma-norma dalam melaksanakan tugasnya. Pentingnya keselarasan antara Kode Etik Advokat dengan Peraturan Perundang-Undangan mencerminkan komitmen terhadap kepatuhan hukum. Selain itu, peran organisasi advokat dalam mengawasi dan memeriksa pelaksanaan kode etik, serta fungsi Dewan Kehormatan dalam menangani pelanggaran, menunjukkan adanya mekanisme internal yang bertujuan menjaga integritas profesi. Keputusan Dewan Kehormatan tidak menggantikan tanggung jawab pidana, menciptakan lapisan perlindungan hukum yang komprehensif.

Regulasi yang lebih lanjut, terutama mengenai tata cara pemeriksaan dan pengadilan terhadap pelanggaran kode etik, diatur melalui Keputusan Dewan Kehormatan. Hal ini menciptakan kerangka kerja yang terstruktur untuk menangani berbagai situasi yang melibatkan kode etik profesi Advokat. Dalam ketentuan perihal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 32 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Pengangkatan sebagai pengacara praktik yang pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 26

(IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

4. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.⁸

Kesimpulan dari Pasal 32 yaitu, Ayat (1) menyatakan bahwa advokat yang telah diangkat sebelum undang-undang ini berlaku diakui sebagai advokat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Ayat (2) mengatur pengangkatan pengacara praktik yang masih dalam proses penyelesaian pada saat undang-undang ini berlaku, dengan menerapkan ketentuan yang ada. Sementara itu, Ayat (3) menunjukkan bahwa tugas dan wewenang Organisasi Advokat sementara dijalankan bersama oleh berbagai asosiasi advokat dan konsultan hukum. Terakhir, Ayat (4) memberikan batas waktu dua tahun untuk pembentukan Organisasi Advokat setelah undang-undang ini berlaku.

Jadi, dalam dua tahun setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, diharapkan bahwa Organisasi Advokat akan terbentuk. Hal ini menunjukkan kebutuhan untuk menyusun dan membentuk badan yang akan mengatur dan mewakili advokat serta konsultan hukum. Selain itu, kolaborasi sementara antara berbagai asosiasi hukum menunjukkan upaya koordinasi untuk menjalankan tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebelum pembentukan resmi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 32 Ayat (3) menetapkan bahwa, “Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)”.⁹ Dilanjut Pasal 33 yang berbunyi, “Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat”.¹⁰

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 32 Ayat (3) dan Pasal 33 tersebut, dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang Organisasi Advokat dilaksanakan secara kolaboratif oleh berbagai entitas. Hal ini mencerminkan Kerjasama lintas organisasi dalam menjalankan tanggung jawab advokat. Adapun implementasi hukum advokat kesesuaiannya diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia yaitu dalam Bab I Ketentuan Umum sampai BAB VIII Pelaksanaan Kode Etik.

⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 32

⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 32 Ayat (3)

¹⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 33

Namun pada kenyataannya banyak advokat yang melanggar kode etik dalam menjalankan profesinya, bahkan tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan tersebut di depan umum.¹¹ Seperti contoh kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan advokat Soelaiman Djoyoatmojo. Majelis Hakim Dewan Kehormatan Daerah menyatakan Soelaiman Djoyoatmojo terbukti melanggar Kode Etik Advokat Indonesia.

Soelaiman Djoyoatmojo selaku Teradu terbukti bersalah melanggar Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) pada saat masa proses peradilan perkara PKPU PT. Mahakarya Agung Putera berlangsung. Kasus ini berawal saat teradu Advokat Sulaiman meminta sejumlah uang untuk sebagai "jalan damai` antara PT. Mahakarya Agung Putera dengan konsumennya bernama Jhon Candra. Tindakan "meminta sejumlah uang" tersebut, oleh hakim menilai telah melanggar ketentuan kode etik advokat. Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Teradu, Soelaiman Djoyoatmojo, S.H. terbukti melanggar pasal 3 huruf B dan D Kode Etik Advokat Indonesia. Pasal 3 huruf b dan d Kode Etik Advokat Indonesia yang berbunyi: b) Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. d) Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat. Hakim menjatuhkan sanksi kepada Soelaiman Djoyoatmojo berupa pemberhentian sementara selama dua belas (12) bulan dari profesi advokat.¹²

Kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat Advokat Indonesia (PERADI) pernah menjatuhkan sanksi terberat pada dua orang advokat (juni 2006 sampai juni 2010), pertama kali pada tanggal 26 Januari 2007 terhadap advokat HS, amar putusannya adalah "Menghukum Teradu dengan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi Advokat Indonesia". (vide halaman 5 Putusan No.011/PERADI/DKD-DKI/I/2007). Kedua kali pada tanggal 16 Mei 2008 terhadap advokat TML, amar putusannya "Menghukum Teradu dengan pemberhentian tetap dari profesinya sebagai Advokat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap". (Vide halaman 23 Putusan No.016/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA /PUTUS-AN/V/08).

Advokat HS mendapat kuasa dari klien bernama VK pada 15 Agustus 2002 untuk mengajukan ganti kerugian atas terbakarnya tempat usaha VK di Solo. Surat gugatan sudah diajukan dan terdaftar di PN Surakarta, namun kemudian HS memberitahu kepada VK agar gugatan dicabut dulu karena HS sangat sibuk dan berkasnya belum siap. Ternyata diam-diam HS sudah mencapai kesepakatan dengan pihak lawan dan menerima uang damai sebesar Rp.26.500.000,- (Dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) VK kemudian mengganti advokat lain dan mengajukan gugatan baru dengan HS sebagai salah satu Tergugat. Akhirnya Pengadilan memutuskan HS telah melakukan PMH dan menghukum dia untuk mengembalikan uang damai yang diterimanya serta membayar ganti rugi immaterial kepada VK. Ternyata perintah itu tak pernah dilaksanakan oleh HS, maka ia diadukan oleh VK ke persidangan Kode Etik PERADI.

¹¹ Prastio, A. D., Irkham, M., & Lubis, F. (2023). *Sanksi Pelanggaran Kode Etik Advokat*. El-Mujtama: *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), h. 736-745

¹² Prastio, A. D., Irkham, M., & Lubis, F. (2023). *Sanksi Kode Etik Advokat*. El-Mujtama: *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), h. 75-85

Dalam kesempatan membela diri, HS memberi tanggapan bahwa yang berhak memeriksa perkara ini adalah Dewan Kehormatan IPHI Surakarta, bukan DK PERADI Jakarta. HS tidak dapat menerima tindakan DPP IPHI menahan kartu advokatnya dan mengancam akan melapor ke pihak yang berwajib kalau kartu advokatnya tidak dikembalikan dalam tujuh hari. Di samping itu, HS mengaku sudah mengembalikan biaya perkara kepada VK. HS juga menunjukkan bukti bahwa mobil dan BPKBnya telah diambil tanpa sepengetahuan dia.¹³

Majelis Kehormatan PERADI dalam pertimbangannya menyatakan bahwa: 1) HS terbukti telah melakukan perdamaian dengan pihak lawan dan telah menerima uang ganti kerugian, dilanjutkan dengan pencabutan gugatan tanpa ijin dari VK; 2) Pencabutan ini menurut HS disebabkan karena ingin memperbaiki materi gugatan, tapi terbukti HS tak pernah ajukan gugatan baru setelah perbaikan; 3) HS terbukti melakukan PMH terhadap VK menurut Putusan PN yang sudah dikuatkan dengan Putusan PT; 4) HS tidak membantah apa yang diadukan oleh VK, bahkan mengaku sudah menerima uang ganti kerugian tanpa seizin dan sepengetahuan VK; 5) HS sudah membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang damai yang sudah diterimanya serta uang ganti rugi immaterial yang sudah diputus oleh Pengadilan; 6) Majelis Kehormatan PERADI sudah memberi kesempatan kepada HS untuk menepati janjinya tetapi tidak dilakukan oleh HS bahkan dalam persidangan HS mencoba memberikan keterangan yang berbelit-belit tanpa menunjukkan perasaan menyesal atau rasa bersalah.

Dengan demikian menurut Majelis; 1) HS telah melanggar sumpahnya sebagai Advokat; 2) menelantarkan dan merugikan kliennya, sehingga demi mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak karena ulah HS yang tidak bertanggung jawab, maka Majelis menganggap perlu mencabut ijin HS sebagai advokat. Sehingga demi mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak lagi karena ulah HS yang tidak bertanggung jawab, maka Majelis menganggap perlu mencabut izin HS sebagai advokat.

Kasus advokat Todung Mulya Lubis (TML) dan lawfirmnya diadukan oleh Advokat HPH dan MA ke PERADI dengan aduan melanggar kode etik karena menangani perkara yang berbenturan kepentingannya. HPH dan TML adalah advokat yang saling berhadapan dalam satu perkara penjualan asset bekas BPPN. HPH membela kliennya SGC/GY sedangkan TML membela kliennya SG.¹⁴

TML diadukan karena pada tahun 2002 ketika menjadi anggota TBH KKS (Tim Bantuan Hukum Komite Kebijakan Sektor Keuangan) untuk pemerintah RI, TML setelah memeriksa kepatuhan dan pelanggaran SG menyatakan bahwa SG telah melanggar MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement) 1998 dan merugikan keuangan negara. Ketika itu TML menerima honor pengacara dari negara RI. Akan tetapi pada tahun 2006 TML ketika bertindak sebagai pembela SG atas gugatan pelanggaran MSAA 1998, dalam pembelaannya menyatakan bahwa SG tidak melanggar MSAA dan tidak merugikan keuangan negara; Pengaduan kedua adalah TML telah memberikan pernyataan dan pembelaan hukum yang total berbeda dan bertolak belakang kepada dua klien yang berbeda akan tetapi atas pertanyaan hukum yang sama; Pengaduan ketiga adalah TML telah

¹³ Yiot Kie, 2022. *Malpraktik Advokat dan sanksi Kode Etiknya*, (Jakarta: Skripsi, Universitas Indonesia), h. 75-77

¹⁴ Yiot Kie, 2022. *Malpraktik Advokat dan sanksi Kode Etiknya*, (Jakarta: Skripsi, Universitas Indonesia), h. 79

“mengabaikan dan menelantarkan kepentingan kliennya yaitu Pemerintah RI dan melakukan perbuatan tidak terpuji yang merugikan kliennya Pemerintah RI”; Pengaduan keempat adalah TML telah menerima honor advokat yang sangat besar dan fantastis, fasilitas transport pesawat jet pribadi dan kamar hotel suite mewah dari dua klien yang berbeda kepentingan (conflict of interest) dan berlawanan, dari pihak yang menyuruh audit dan dari pihak yang diaudit; Pengaduan kelima adalah TML telah berbohong di depan persidangan resmi dengan mencoba mengingkari tanda-tangannya dalam surat legal audit yang didalamnya tercantum semua tanda tangan dari semua TBH KKS.

Pengaduan keenam adalah TML selaku ketua Masyarakat Transparansi sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan masyarakat dan sering mengeluarkan pernyataan seolah-olah anti korupsi dan anti perbuatan tidak terpuji, padahal kenyataannya TML justru melakukan tindakan tidak terpuji, mengaku tokoh LSM tetapi justru agresif dan super aktif membela para konglomerat kaya dan para obligor yang merugikan negara karena pelanggaran BLBI dan pelanggaran BMPK (Batas Minimum Pemberian Kredit) yang merugikan keuangan negara, bahkan TML tanpa rasa riku datang ke persidangan di Lampung dengan pesawat jet pribadi yang disediakan oleh SG. (vide hlm. 3 - 7 Putusan PERADI No. 036).

Dalam kesempatan menjawab pengaduan tersebut, TML telah mengajukan eksepsi dan menjawab antara lain bahwa: (vide hlm. 10 -18 Putusan PERADI) Tidak terbukti adanya benturan kepentingan khususnya dalam hal TML dan law firm-nya bertindak sebagai kuasa hukum SG ketika digugat perdata oleh klien-klien HPH di PN Gunung Sugih dan Kotabumi; Tidak ada pertentangan kepentingan ketika TML dan law firm-nya menjadi kuasa hukum SG dalam gugatan-gugatan perdata pada tahun 2007 dan ketika menjadi anggota TBH KKS pada tahun 2002; Tidak terbukti pelanggaran khususnya mengenai menelantarkan kepentingan klien yaitu Pemerintah RI karena pihak pemerintah RI samasekali tidak pernah menyatakan adanya kepentingan negara yang dirugikan atau ditelantarkan dengan penunjukan TML sebagai kuasa SG dan seterusnya.

Pertimbangan Majelis Kehormatan (vide hlm. 18-22 Putusan PERADI) antara lain: 1) TML masih terkait dengan kepentingan SGC yang dulu termasuk perusahaan SG, tetapi TML justru menjadi kuasa hukum SG yang sekarang menjadi „lawan“ pemilik baru SGC/GY; 2) Kepentingan Pemerintah RI terkait dengan legal audit SGC seharusnya dirahasiakan oleh TML tetapi faktanya dalam persidangan TML mengungkapkan sebagian isi TBH yang seharusnya dirahasiakan. Bahkan dalam dokumen TBH dikatakan SG melanggar MSAA namun dalam sidang TML justru menyatakan bahwa SG tidak melanggar MSAA. Menurut Majelis, TML terbukti telah melanggar Pasal 4 huruf (j) KEAI; 3) TML terbukti melanggar Pasal 3 huruf (b) KEAI karena TML tidak lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan; 4) Tidak cukup bukti bahwa TML telah menelantarkan kliennya yaitu Pemerintah RI karena tugas TBH sudah selesai tahun 2002 dan tidak ada keberatan dari Pemerintah RI ketika TML menjadi kuasa hukum SG di tahun 2006-2007; 5) Majelis tidak sependapat dengan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh TML bahwa suatu legal opinion bisa saja berubah tergantung situasi kondisi; 6) Tuduhan selebihnya tidak cukup bukti dan karena itu harus dinyatakan ditolak; 7) Terbukti dalam persidangan di PN Gunung Sugih dan PN Kotabumi, para Pengadu sudah meminta melalui

Majelis Hakim agar TML mengundurkan diri sebagai kuasa hukum SG yang dijawab oleh Majelis bahwa hal itu adalah wewenang Organisasi Advokat untuk memutuskan, dan terbukti TML tetap saja meneruskan pembelaannya; 8) TML pernah dihukum oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikadin dengan hukuman berupa peringatan keras, maka TML harus dihukum dengan sanksi yang lebih berat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Kehormatan Daerah PERADI DKI Jakarta memutuskan: 1) Menyatakan TML terbukti melanggar ketentuan Pasal 4 huruf (j) dan Pasal 3 huruf (b) KEAI; dan 2) Menghukum TML dengan pemberhentian tetap dari profesinya sebagai advokat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Artinya, Majelis Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia DKI Jakarta memberhentikan secara tetap Todung Mulya Lubis sebagai advokat. Ia dinilai melakukan pelanggaran berat, yaitu melanggar larangan konflik kepentingan dan lebih mengedepankan materi dalam menjalankan profesi dibandingkan dengan penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan.

Kasus-kasus diatas merupakan contoh sebagian kecil diantara sekian banyak kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat di Indonesia dan menurut penulis hal ini sudah cukup sebagai pembuktian. Namun penulis akan membahas pelanggaran kode etik advokat oleh advokat kondang Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H, M.Hum merupakan seorang advokat, presenter, serta pengusaha asal indonesia dengan gaya hidupnya yang mewah.

Hotman Paris sebagai advokat yang terkenal dan memiliki banyak pengalaman serta seorang doktor hukum seharusnya menjadi contoh bagi para penerus di bidang advokat. Namun realitanya justru melanggar kode etik advokat yang seharusnya menjadi tolok ukur dalam menjalankan profesinya.

Hotman Paris dianggap telah melanggar kode etik advokat atas penyerangan pribadi terhadap Hotma Sitompoel melalui postingan di akun media sosial pribadinya, @hotmanparisofficial. Hotman Paris dianggap melanggar Pasal 4 huruf a kode etik advokat yang menyatakan bahwa Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Sedangkan Hotman Paris dalam kasus rumah tangga Hotma Sitompoel dengan Desiree Tarigan tidak mengupayakan jalan damai. Hotman Paris justru melakukan konferensi pers berkali-kali yang membuat perkaratersebut semakin mencuat ke publik tanpa penyelesaian secara hukum.¹⁵

Hotman Paris dianggap telah melanggar kode etik advokat Pasal 3 huruf g dan h Kode Etik Advokat Indonesia yang menyatakan bahwa advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dan advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.¹⁶ Hotman paris melalui postingan di akun media social pribadinya, @hotmanparisofficial memeluk Wanita lain yang dianggap sebagai

¹⁵ Jonatan, F., Natashya, Laurencia, C., Jonathan, E., Damanik, G. Y., & Saly, J. N. (2023). Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17), h. 294-301

¹⁶ Kode Etik Advokat Indonesia.

pelanggaran asusila kode etik advokat.¹⁷ Merujuk pada pasal 3 huruf g kode etik advokat, menyatakan bahwa advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).

Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa masih mungkin adanya oknum advokat yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat Indonesia. Dalam kasus seperti itu, Dewan Kehormatan memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran terhadap Hotman Paris.

Advokat yang terbukti melanggar Kode Etik dapat dikenai sanksi, termasuk teguran, larangan praktik, atau tindakan disipliner lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Meskipun pelanggaran bisa terjadi, upaya untuk memberantasnya dan menegakkan standar etika tetap menjadi fokus untuk menjaga profesionalisme dalam praktek hukum.

Penanganan Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia

Mekanisme pengaduan terhadap pelanggaran dijelaskan secara rinci dalam Kode Etik Advokat Indonesia Bab IX Tentang Dewan Kehormatan Pasal 11, Pasal 12, dan pasal 13, sebagai berikut:

- a. Bagian Pertama, Ketentuan Umum Pasal 11, yaitu :
 1. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat.
 2. Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu :
 - a. Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah; dan
 - b. Tingkat Dewan Kehormatan Pusat.
 3. Dewan Kehormatan Cabang/daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir.
 4. Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dimana teradu sebagai anggota pada tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat organisasi dimana teradu sebagai anggota, dan Pengadu/Teradu.¹⁸
- b. Bagian Kedua, Pengaduan Pasal 12, yaitu :
 1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu klien, teman sejawat advokat, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, Dewan Pimpinan Pusat/Cabang /Daerah dari organisasi profesi dimana Teradu menjadi anggota.
 2. Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang dipersamakan untuk itu.

¹⁷ Nabilla, F. (2022, April 3). Kronologi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hotman Paris, Gegara Konten Asusila? suara.com. <https://www.suara.com/entertainment/2022/04/03/145617/kronologi-dugaan-pelanggaran-kode-etik-hotman-paris-gegara-konten-asusila>. pada diakses pada tanggal 15 Juni 2023

¹⁸ Kode Advokat Indonesia

3. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat.¹⁹
- c. Bagian Ketiga, Tata Cara Pengaduan pada Pasal 13, yaitu :
 1. Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota.
 2. Bilamana di suatu tempat tidak ada Cabang/Daerah Organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat.
 3. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang/Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.
 4. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Dewan Pimpinan Cabang/Daerah.²⁰

Pasal 11 memberikan wewenang kepada Dewan Kehormatan untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia. Pemeriksaan dilakukan melalui cabang/daerah dan pusat. Biaya ditanggung oleh pihak teradu, Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, Dewan Pimpinan Pusat, atau pengadu/teradu, menunjukkan tanggung jawab kolektif. Perlu juga dipertimbangkan bagaimana biaya yang dibebankan pada pihak teradu atau organisasi dapat memengaruhi keadilan, terutama jika pihak tersebut tidak mampu secara finansial. Sistem insentif atau perlindungan bagi pihak yang membawa pengaduan juga bisa menjadi pertimbangan penting.

Pasal 12 mengidentifikasi pihak yang berwenang mengajukan pengaduan, mencakup klien, teman sejawat, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, dan Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah organisasi profesi. Ini memperluas cakupan partisipasi dalam proses pengaduan. Sementara memberikan cakupan yang luas untuk pihak yang dapat mengajukan pengaduan, dapat menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana memastikan bahwa pengaduan diajukan dengan itikad baik dan bukan sebagai alat untuk tujuan yang kurang baik. Pasal 13 mengatur tata cara pengaduan, menekankan pentingnya pengaduan tertulis dengan alasan-alasan yang jelas. Juga memberikan fleksibilitas untuk mengajukan pengaduan ke Cabang/Daerah terdekat atau pusat dalam situasi tanpa Cabang/Daerah. Dalam Pasal 13, penting untuk memastikan bahwa tata cara pengaduan memberikan keseimbangan antara ketegasan dan keadilan. Proses harus transparan dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, struktur pasal memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pemeriksaan dan pengadilan pelanggaran etika Advokat, sambil memastikan keterlibatan berbagai pihak dan transparansi proses. Juga, penting untuk mempertimbangkan aspek-

¹⁹ Kode Etik Advokat Indonesia.

²⁰ Kode Etik Advokat Indonesia.

aspek ini guna meningkatkan efektivitas dan keadilan dari mekanisme Dewan Kehormatan dalam menangani pelanggaran etika Advokat.

Pemeriksaan Formal dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Advokat

Pemeriksaan Dewan Kehormatan terhadap kasus pelanggaran dijelaskan secara rinci dalam Kode Etik Advokat Bab IX Tentang Dewan Kehormatan Bagian Empat Pasal 14, Bagian Kelima Pasal 15, dan Bagian Keenam Pasal 16, adapun bunyi dari Pasal tersebut, yaitu:

- a. Bagian Keempat, Pemeriksaan Tingkat Pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, Pasal 14 :
 1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut.
 2. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.
 3. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya
 4. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.
 5. Dalam hal jawaban yang diajukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir dipersidangan yang sudah ditetapkan tersebut.
 6. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.
 7. Pengadu dan yang teradu, huruf (a) Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasai kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat, huruf (b) Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.
 8. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, huruf (a) Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku, huruf (b) Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang

pasti, huruf (c) Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.

9. Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir, huruf (a) Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut, huruf (b) Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan Kehormatan Cabang/Daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi, huruf (c) Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu, huruf (d) Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.²¹
- b. Bagian Kelima, Sidang Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, Pasal 15 :
 1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah bersidang dengan Majelis yang terdiri sekurang kurangnya atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.
 2. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.
 3. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua.
 4. Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu.
 5. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.²²
- c. Bagian Keenam, Cara Pengambilan Keputusan, Pasal 16 :
 1. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil Keputusan yang dapat berupa, huruf (a) Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima, huruf (b) Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksisanksi kepada teradu, huruf (c) Menolak pengaduan dari pengadu.
 2. Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar.
 3. Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak

²¹ Kode Advokat Indonesia

²² Kode Advokat Indonesia

yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

4. Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan didalam berkas perkara.
5. Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan. dalam keputusan yang bersangkutan.²³

Dilanjut dalam Kode Etik Advokat Indonesia Bab IX tentang Dewan Kehormatan menjelaskan secara rinci terkait sakni-saknsi, penyampaian salinan keputusan, pemeriksaan tingkat banding dewan kehormatan pusat, keputusan dewan kehormatan, dan ketentuan lain tentang dewan kehormatan. Adapun penjelasannya dijelaskan pada Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 sebagai berikut:

a. Bagian Ketujuh, Sanksi-Sanksi Pasal 17 :

1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa, huruf (a) Peringatan biasa, huruf (b) Peringatan keras, huruf (c) Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, huruf (d) Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
2. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat dapat dikenakan sanksi, huruf (a) Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat, huruf (b) Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan, huruf (c) Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik, huruf (d) Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.
3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan.
4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.²⁴

b. Bagian Kedelapan, Penyampaian Salinan Keputusan Pasal 18 yang berbunyi, dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan kehormatan Cabang/Daerah harus disampaikan kepada : huruf (a) Anggota yang diadakan/teradu, huruf (b) Pengadu, huruf (c) Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dari semua organisasi profesi, huruf (d) Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi, huruf (e) Dewan Kehormatan Pusat, huruf (f)

²³ Kode Advokat Indonesia

²⁴ Kode Etik Advokat Indonesia

Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.²⁵

- c. Bagian Kesembilan, Pemeriksaan Tingkat Banding Dewan Kehormatan Pusat, Pasal 19
 1. Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat.
 2. Pengajuan permohonan banding beserta Memori Banding yang sifatnya wajib, harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan.
 3. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima Memori Banding yang bersangkutan selaku pembanding selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penerimaannya, mengirimkan salinannya melalui surat kilat khusus/tercatat kepada pihak lainnya selaku terbanding.
 4. Pihak terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan Memori Banding.
 5. Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.
 6. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara dilengkapi dengan bahan-bahan yang diperlukan, berkas perkara tersebut diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah kepada dewan Kehormatan Pusat.
 7. Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
 8. Dewan kehormatan Pusat memutus dengan susunan Majelis yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota atau lebih tetapi harus berjumlah ganjil yang salah satu merangkap Ketua Majelis.
 9. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.
 10. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Pusat yang khusus diadakan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua.
 11. Dewan Kehormatan Pusat memutus berdasar bahan-bahan yang ada dalam berkas perkara, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri.
 12. Dewan Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh DKP.
 13. Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, mutatis mutandis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Pusat.²⁶

²⁵ Kode Etik Advokat Indonesia

- d. Bagian Kesepuluh, Keputusan Dewan Kehormatan, Pasal 20 :
1. Dewan Kehormatan Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dengan memutuskan sendiri.
 2. Keputusan Dewan kehormatan Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak dimana hari, tanggal dan waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
 3. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam MUNAS.
 4. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan Pusat harus disampaikan kepada: huruf (a) Anggota yang diadukan/teradu baik sebagai pembanding ataupun terbanding, huruf (b) Pengadu baik selaku pembanding ataupun terbanding, huruf (c) Dewan Pimpinan Cabang/Daerah yang bersangkutan, huruf (d) Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan, huruf (e) Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi, huruf (f) Instansi-instansi yang dianggap perlu.
 5. Apabila seseorang telah dipecat, maka Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan Kehormatan Cabang/Daerah meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi untuk memecat orang yang bersangkutan dari keanggotaan organisasi profesi.
- e. Bagian Kesebelas, Ketentuan lain tentang Dewan Kehormatan Pasal 21 yang berbunyi, Dewan Kehormatan berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur tentang Dewan Kehormatan dalam Kode Etik ini dan atau menentukan hal-hal yang belum diatur didalamnya dengan kewajiban melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi agar diumumkan dan diketahui oleh setiap anggota dari masing-masing organisasi.²⁷

Pertama, Pasal 17 menguraikan sanksi-sanksi terkait pelanggaran Kode Etik Advokat, menunjukkan keberlanjutan organisasi profesi terhadap anggotanya. Namun, perlu perhatian terhadap keadilan dan proporsionalitas sanksi sesuai dengan beratnya pelanggaran. Kedua, Pasal 18 menegaskan transparansi keputusan dengan penyampaian salinan kepada pihak terkait dalam batas waktu yang ditentukan. Ini mendukung akuntabilitas dan memberikan kesempatan bagi pihak terkait untuk merespons.

Ketiga, Pasal 19 menangani banding dengan proses yang terperinci, memberikan jaminan untuk keadilan dan pemeriksaan ulang jika diperlukan. Keterlibatan Dewan Kehormatan Pusat menunjukkan upaya untuk menyelesaikan perselisihan secara adil. Keempat, Pasal 20 menggariskan kekuatan dan ketentuan keputusan Dewan Kehormatan Pusat, memberikan kepastian hukum dan menetapkan keputusan sebagai final dan mengikat. Ini penting untuk menjaga otoritas dan integritas proses.

Terakhir, Pasal 21 memberi wewenang pada Dewan Kehormatan untuk menyempurnakan atau menentukan hal-hal yang belum diatur, menunjukkan fleksibilitas

²⁶ Kode Etik Advokat Indonesia

²⁷ Kode Etik Advokat Indonesia

dalam menangani situasi yang mungkin tidak tercakup dalam Kode Etik. Pasal 21 ini menunjukkan kebijakan Dewan Kehormatan untuk menyesuaikan dan menyempurnakan prosedur sesuai kebutuhan, dengan tanggung jawab melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat. Ini mencerminkan semangat peningkatan berkelanjutan dalam menjaga kualitas dan integritas profesi Advokat.

Secara keseluruhan, Kode Etik Advokat ini menunjukkan upaya untuk menciptakan kerangka kerja yang adil, transparan, dan akuntabel dalam menanggapi pelanggaran etika. Sanksi yang ditetapkan menggambarkan seriusnya komitmen terhadap standar tinggi dalam profesi ini. Proses banding dan keputusan Dewan Kehormatan Pusat memberikan lapisan perlindungan untuk memastikan bahwa keadilan tercapai dan keputusan bersifat final.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan Hotman Paris diadukan oleh Hotma Sitompoel ditujukan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah PERADI sesuai dengan Pasal 13 Kode Etik Advokat. Hotman Paris juga dilaporkan karena dianggap melanggar Pasal 6 huruf b, d, dan f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menjelaskan bahwa berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya; berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya; melanggar sumpah/janji advokat dan atau kode etik profesi advokat.

Kejadian yang dilakukan Hotman Paris tersebut merupakan persoalan sikap dan perilaku seorang advokat. Sikap dan perilaku merupakan hal yang utama dalam menjalankan profesionalisme yang mana menyatakan bahwa Hotman Paris tidak profesional dalam menjalankan profesi advokat sebagai profesi luhur (*officium nobile*). Sehingga sudah layak atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh Hotman Paris diberikan sanksi yang setimpa.

Dalam penegakan kode etik advokat, Dewan Kehormatan berperan sangat aktif dalam melakukan pengawasan terhadap para pengemban profesi. Dewan Kehormatan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Kode Etik Advokat merupakan sebuah Lembaga yang hadir dalam setiap organisasi advokat yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili kasus pelanggaran kode etik. Proses awal penegakan ini dimulai dengan klasifikasi identitas setiap advokat yang tergabung dalam organisasi advokat.

Dewan Kehormatan memegang peran yang sangat vital dalam proses penegakan kode etik advokat. Dalam penegakan Kode Etik Advokat, Dewan Kehormatan melibatkan Masyarakat umum, sesama advokat, akademisi, dan pihak-pihak penegak hukum lainnya untuk melakukan pengawasan terhadap praktik profesi advokat. Dalam kasus pelanggaran Kode Etik Advokat oleh Hotman Paris yang menangani adalah dewan kehormatan perhimpunan advokat indonesia (PERADI). Hal ini ini dikarenakan Hotman Paris pada saat terjadinya kasus tersebut masih menjadi anggota dari PERADI.

Kasus pelanggaran kode etik ini naik ke Tingkat pusat yang mana diadili oleh Dewan Kehormatan Pusat (DKP) Peradi. Dewan Kehormatan Pusat (DKP) Peradi menyatakan bahwa Hotman Paris telah melakukan pelanggaran Kode Etik Advokat. Hal ini tertuang dalam putusan Majelis Dewan Kehormatan Pusat (MDKP) Nomor 19/DKP/PERADI/I/2022 pada tanggal 12 April 2022. Hotman Paris terbukti melanggar Pasal 6 huruf b,d dan f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokat, Pasal 4 huruf a dan Pasal 3 huruf g dan h Kode Etik Advokat Indonesia. Dalam pertimbangan putusan Hotman Paris tidak sama sekali menggambarkan adanya Upaya untuk menyelesaikan permasalahan hukum secara mediasi sebagaimana Pasal 4 huruf a Kode Etik Advoka.²⁸

Perilaku Hotman Paris yang membuka masalah rumah tangga ke publik juga dianggap tidak menggambarkan perilaku atau sikap seorang advokat serta mencoreng profesi advokat yang luhur (*officium nobile*) sebagaimana Pasal 3 huruf g Kode Etik Advokat. Dewan Kehormatan melarang Hotman Paris Hutapea untuk menjalankan profesi advokat di luar maupun di muka pengadilan selama 3 (tiga) bulan masa pemberhentian sementara.

Pemberhentian sementara merupakan sanksi disiplin atas pelanggaran berat, tidak estetika dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapatkan sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik. Eksekutor yang berwenang dalam pelaksanaan Kode Etik Advokat adalah Dewan Pimpinan Nasional dan Mahkamah Agung.²⁹

Sanksi berat yang diterima Hotman Paris dilakukan oleh Dewan Pimpinan Nasional berdasar laporan dari Dewan Kehormatan yang di koordinasikan dengan Mahkamah Agung. Namun sayangnya selama selang 3 hari setelah kasus pelanggaran kode etik ini terjadi, Hotman Paris menyatakan bahwa ia sudah keluar dari Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADI). Hotman Paris juga menyatakan bahwa dirinya bergabung ke dalam organisasi advokat Dewan Pengacara Nasional.³⁰ Keluarnya Hotman Paris dari organisasi advokat PERADI serta bergabung ke dalam organisasi advokat Dewan Pengacara Nasional (DPN) ternyata tidak menghapus sanksi disiplin yang dia terima. Hal ini dikarenakan sanksi disiplin yang Hotman Paris terima merupakan sanksi disiplin berat yang dikoordinasikan terhadap Mahkamah Agung sebagai final peradilan negara tertinggi membawahi lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dari deskripsi dan pembahasan terkait tinjauan pelanggaran Kode Etik Advokat dalam Praktik Hukum di Indonesia berdasarkan Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, penulisan ini dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis pelaksanaan Kode Etik Advokat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara idealisme normatif Undang-Undang dan realitas praktik sehari-hari. Meskipun Undang-Undang memberikan landasan yang kuat untuk

²⁸ Darmawan, I. K. A. (2022, April 20). Hotman Paris Hutapea Terbukti Melanggar Kode Etik, Begini Jawaban Hotma Sitompoel. *rmoljatim*. <https://www.rmoljatim.id/2022/04/20/hotman-paris-hutapea-terbukti-melanggar-kode-etik-begini-jawaban-hotma-sitompoel>. pada diakses pada tanggal 15 Juni 2023

²⁹ Prastio, A. D., Irkham, M., & Lubis, F. (2023). *Sanksi Pelanggaran Kode Etik Advokat*. El-Mujtama: *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), h. 736-745

³⁰ CNN Indonesia. (2022, April 16). Keluar dari Peradi, Hotman Paris Gabung DPN Indonesia. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220416153527-12-785519/keluar-dari-peradi-hotman-paris-gabung-dpn-indonesia>. pada diakses pada tanggal 15 Juni 2023

menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Meskipun merupakan penegak hukum yang bebas dan mandiri, advokat tetap terikat pada kode etik advokat yang menetapkan sebagai standar etika dan moral dalam menjalankan profesinya. Kenyataannya kasus pelanggaran Hotman Paris menjadi contoh nyata bahwa pelanggaran terhadap etika profesi dapat merugikan nama baik profesi advokat secara keseluruhan advokat di Indonesia.

2. Terkait dengan penerapan sanksi pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia dalam konteks hukum dan etika profesi, dapat disimpulkan bahwa sanksi disiplin berat yang diterima Hotman Paris mencerminkan seriusnya pelanggaran tersebut terhadap norma-norma etika profesi advokat. Meskipun Hotman Paris keluar dari organisasi advokat PERADI, sanksi disiplin tetap berlaku karena sifatnya berkaitan dengan pelanggaran kode etik advokat yang melibatkan Mahkamah Agung. Dalam konteks tersebut penegakan kode etik advokat penting untuk memahami bahwa sanksi-sanksi disiplin merupakan bertujuan untuk menjaga integritas dan martabat profesi advokat. Karena itu, penegakan kode etik advokat bukan hanya sebuah kewajiban hukum belaka, tetapi juga merupakan landasan etika dan moral untuk menjaga standar profesionalisme dan kehormatan profesi advokat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita Serlika, 2019. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Abdulkadir Muhammad, 2001. *Etika Profesi Hukum, Cet. Kedua*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bagus, Lorens. 2000. *Kamus Filsafa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Fauziah Lubis, 2020. *Bunga Rampai Keadvokatan*. Diterbitkan: CV. Manhaji Medan.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jomla/issue/archive/> pada diakses pada tanggal 13 Januari 2024.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/rule-of-law/> pada diakses pada tanggal 13 Januari 2024.
- <https://e-journal.uajy.ac.id/4951/1/Gabriella.pdf/> pada diakses pada tanggal 3 Oktober 2023.
- <https://digilib.yarsi.ac.id/11296/5/10.%20BAB%201.pdf/> pada diakses pada tanggal 3 Oktober 2023.
- <https://media.neliti.com/media/publications/229131-organisasi-advokat-dan-urgensi-peran-pem-d102cc21.pdf/> pada diakses apa tanggal 3 Oktober 2023.
- <https://www.kompasiana.com/leo.tobing/organisasi-advokat-menurut-uu-advokat-peradi/> pada diakses pada tanggal 3 Oktober 2023.
- <https://www.kai.or.id/wp-content/uploads/2016/06/KODE-ETIK-ADVOKAT-INDONESIA.pdf/> pada diakses pada tanggal 4 Oktober 2023.

- <https://e-journal.uajy.ac.id/4935/1/JURNAL%20SKRIPSI%20.pdf/> pada diakses pada tanggal 5 Oktober 2023.
- <http://irwansyah-hukum.blogspot.com/2012/06/pengaduan-pelanggaran-kode.html/> pada diakses pada tanggal 5 Oktober 2023.
- <http://pahamjkt.multiply.com/journal/item/12/> pada diakses pada hari Selasa 10 Oktober 2023.
- <http://repository.iainbengkulu.ac.id/7427/1.PDF/> pada diakses pada hari Selasa 10 Oktober 2023.
- <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=199899/> pada diakses pada hari Selasa 10 Oktober 2023.
- <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/> pada diakses pada hari Selasa 10 Oktober 2023.
- <http://www.antarane.ws.com/view/?i=1177327427&c=NAS&s/> pada diakses pada hari Selasa 10 Oktober 2023.
- <https://123dok.com/id/docs/analisis-undang-undang-nomor-tahun-advokat-persfektif-hukum.10297875/> pada diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.
- <https://123dok.com/id/docs/analisis-undang-undang-nomor-tahun-advokat-persfektif-hukum.10297875/> pada diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.
- Ibrahim, Efendi, 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Journal Scientific of Mandalika (JSM), Vol. 2 No. 12 Desember 2021, e-ISSN: 2745-5955, p-ISSN: 2809-0543.
- Jasman Hasan Muhammad, 2015. *Pengantar Sejarah dan Perkembangan Perhimpunan Advokat Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- K, Bertens. 2013. *Etika*. Yogyakarta: Kanisius.
- K. Lubis Suhrawardi, 2016. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kode Etik Advokat Indonesia.
- Lubis Fauziah, 2020. *Bunga Rampai Keadvokatan*. Medan: CV. Manhaji.
- Pandu Yudha, 2004. *Klien dan Advokat Dalam Praktek*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Pangaribuan, Luhut M.P, 2008. *Penegakkan Etika Bagi Advokat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Priyono Joko. “Kualifikasi, Standarisasi dan Lisensi Advokat Asing”. 165102-ID-non jurnal advokat asing.pdf.
- Reksodiputro Mardjono, *Kriminolog dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Rosyadi Rahmat, 2003. *Advokat dalam Perspektif islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, 2003. *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Risdalina, 2019. “Hubungan Antara Advokat Dengan Klien Dalam Penegakan Hukum Perdata”. Jurnal Ilmiah. Vol. 07. No. 23:08-10.
- Sumaryono E, 1995. *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

- Shidarta, 2006. *Moralitas profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tafsir Ahmad, 2000. *Filsafat Umum “Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra”*, Cet. Kedelapan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Advokat No 18 Tahun 2003.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Pasal 1 Ayat 3).
- Undang-Undang Advokat No 18 Tahun 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Winarta Frans Hendra, 2007. *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*. Disertasi Universitas Padjajaran, Bandung.